



Mengungkap Potensi Konspirasi dalam *Internal Audit Function*

Nabila Amaro Laila Rosyda¹, Tjiptohadi Sawarjuwono², Erina Sudaryati³, Syarifudin^{4*}

^{1,2,3}Universitas Airlangga, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*udinsyarif1109@gmail.com

ABSTRAK

Semakin maraknya tindakan fraud pada lingkup pengadaan dan *engineering* menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha, salah satu jenisnya ialah tindakan korupsi dengan upaya konspirasi yang dilakukan oleh berbagai oknum baik pegawai maupun pemasok dan berdampak pada kerugian Korporasi. *Internal Audit Function* (IAF) menjadi solusi dalam mewujudkan kontrol yang efektif dalam meminimalisir potensi kerugian korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana potensi konspirasi berdampak pada potensi terganggunya IAF khususnya dalam lingkup pengadaan dan *engineering* pada Korporasi XYZ. Metodologi yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada pengumpulan data diantaranya melalui *interview*, *direct observation*, *documentation*, dan *archival record*. Analisis data menggunakan tiga analisis dominan yaitu *pattern matching*, *explanation building*, dan *time-series analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa pola atas potensi konspirasi serta kerugian pada Korporasi XYZ, diantaranya: potensi *success fee* yang diberikan vendor, potensi pengiriman bahan baku *under grade*, potensi penambahan proses produksi, potensi bahan produksi digunakan dalam rentang waktu yang pendek, potensi penyetaraan harga bahan baku *under grade* dengan bahan baku *top grade*, dan potensi pembenahan mesin produksi yang dialihkan ke bengkel eksternal. Berbagai potensi tersebut tentunya juga banyak menimbulkan kerugian bagi korporasi. Sehingga, implikasi dari penelitian ini berusaha untuk meminimalisir adanya dugaan negatif yang mengarah ke potensi konspirasi dan kerugian pada Korporasi XYZ serta dapat menjadi acuan dalam menelaah pengendalian yang mengarah pada potensi konspirasi dengan meningkatkan sistem kontrol melalui IAF.

ABSTRACT

The increase in fraud that occurs in the scope of procurement and engineering raises concerns for business actors, one type of which is acts of corruption with conspiracy efforts carried out by various individuals, both employees and suppliers, resulting in losses for the company. The Internal Audit Function (IAF) is a solution in realizing effective control in minimizing potential company losses. This research aims to reveal how potential conspiracies have an impact on disrupting the potential of the IAF, especially in the scope of procurement and engineering at XYZ Corporation. The methodology used is qualitative with a case study approach which focuses on data collection, including through interviews, direct observation, documentation and archival recording. Data analysis uses three dominant analyses: *pattern matching*, *explanation building*, and *time series analysis*. The research results show several patterns of potential conspiracies and losses at XYZ Corporation, including: potential success fees given by vendors, potential delivery of under grade raw materials, potential additions to the production process, potential use of production materials in a short time span, potential to equalize the price of under grade with upper grade raw materials, and potential for improvements to production machines that are transferred to external workshops. These various potentials also cause many losses for corporations. The implications of this research seek to minimize negative assumptions that give rise to potential collusion and losses for XYZ Company and can be a reference in reviewing controls that give rise to potential collusion by improving the control system through IAF.

Kata Kunci :

Konspirasi, Internal Audit Function, Pengadaan, *Engineering*, Teori Konspirasi, *E-Procurement*, *Whistle Blowing* .

Keywords :

Conspiracy, Internal Audit Function, Procurement, Engineering, Conspiracy Theory, E-Procurement, Whistle Blowing

PENDAHULUAN

Semakin maraknya tindakan fraud yang terjadi pada lingkup pengadaan dan *engineering* menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha. Tindakan fraud yang terjadi seperti korupsi yang erat kaitannya dengan upaya konspirasi dengan melibatkan berbagai pihak baik oknum pegawai maupun pemasok sehingga berdampak pada kerugian Korporasi. Seperti halnya tindakan konspirasi pengadaan barang dan jasa pemerintah mengenai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan Bupati Lampung Selatan tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena terbukti menerima uang dari Anggota DPRD Lampung sejumlah Rp57 miliar dari berbagai proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan (Tantyo, 2020). Tak hanya itu, kasus serupa juga terjadi pada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena adanya konspirasi dalam melakukan rekayasa keuangan dan mengakibatkan kerugian besar. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) telah menelaah terhadap hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2013 ditemukan sedikitnya 510 kasus penyimpangan keuangan negara, antara lain sebanyak 234 kasus terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan 276 kasus terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan (Widaningsih & Hakim, 2015).

Fenomena tersebut sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh DeSimone *et al.* (2021) bahwa tindakan konspirasi mengarah pada *Internal Audit Function* (IAF) yang memunculkan dugaan bahwa upaya dalam melakukan konspirasi bukan hanya melibatkan satu pihak, melainkan secara berkelompok. Oleh sebab itu, topik konspirasi menarik untuk diangkat, dikarenakan proses bisnis yang berjalan dalam sebuah Korporasi tidak dapat dijalankan hanya dengan satu bagian saja, melainkan memerlukan kerjasama antar bagian yang terlibat didalamnya. Di sisi lain peran IAF dalam mewujudkan kontrol yang efektif atas proses bisnis tentu memerlukan adanya proses penilaian secara menyeluruh dan berkala, sehingga potensi kerugian Korporasi bisa diminimalisir (Ratri & Bernawati, 2020). Atas pertimbangan tersebut, penelitian difokuskan untuk menelaah potensi konspirasi yang melekat pada proses bisnis yang berjalan guna upaya peningkatan kontrol melalui IAF.

Pendapat peneliti terhadap dugaan bahwa potensi konspirasi ini ada pada Korporasi XYZ (*Non-go public*) diperkuat pada saat ditemui adanya indikasi fraud dalam Korporasi XYZ dalam ranah bahan baku dan mesin produksi. Korporasi XYZ dalam penelitian ini merupakan sebuah Perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur pengolahan kayu di Jawa Timur. Peneliti menemui adanya proses pemisahan bahan baku dalam lingkup produksi dan tingginya biaya perbaikan mesin produksi (Mardjono *et al.*, 2024). Dugaan peneliti terhadap potensi konspirasi ini didasarkan pada aturan terkait spesifikasi bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, dimana bahan baku yang ditentukan oleh Korporasi XYZ dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah *grade A* (premium). Mengingat hanya ada satu spesifikasi yaitu *grade A* untuk bahan baku yang akan masuk ke proses produksi, maka dinilai tidak wajar jika terdapat pemisahan bahan baku dalam proses produksi.

Abdullah *et al.* (2018) juga mengemukakan bahwa IAF merupakan elemen penting dari pengendalian proses tenaga kerja yaitu dalam membantu mencegah dan mendeteksi fraud yang dihasilkan dari kesalahan atau penipuan, audit kinerja. Potensi fraud yang dibahas dalam penelitian ini mengarah pada kasus korupsi dalam lingkup pengadaan dan *engineering* pada Korporasi XYZ (Fahmi & Syahputra, 2019), dimana peneliti kerap menemui kesenjangan dalam pelaksanaan IAF yaitu Auditor internal kerap dihadapkan pada fenomena potensi konspirasi yang berdampak pada potensi IAF berjalan tidak sesuai harapan, situasi tersebut bukan hanya isu dalam Korporasi *go public* melainkan pada Korporasi *Non-go public* sekalipun (Kassem & Turksen, 2021). Tentang betapa pentingnya IAF sebagai tonggak pengendalian Korporasi telah diyakini kebenarannya. Bahkan beberapa penelitian telah menuangkan atribut-atribut dalam menunjang realisasi IAF secara efektif, seperti halnya oleh; Cohen & Sayag (2010), Badara & Saidin (2013), Bonrath & Eulerich (2021), dan Abdelrahim & Al-Malkawi (2022).

Potensi terganggunya IAF akibat konspirasi tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan risiko kegagalan bisnis jika hal demikian tidak segera dihentikan maupun ditindaklanjuti. *International Professional Practice Framework* (IPPF) Tahun 2015 mengemukakan bahwa Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan asuransi yang independen dan objektif yang dirancang untuk meningkatkan kualitas operasi bisnis dalam sebuah organisasi (Anderson *et al.*, 2015). Sejalan dengan pernyataan IPPF (2015), peneliti menggarisbawahi bahwa evaluasi diperlukan dalam meningkatkan efektivitas IAF, salah satunya yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap adanya tindakan yang mengarah pada indikasi konspirasi serta hal-hal yang bisa mengganggu IAF sebagai tonggak bagi korporasi dalam menegakkan pengendaliannya. Bahkan Oliver (2022) menyarankan bahwasannya penting untuk mempelajari konspirasi melalui teori konspirasi, khususnya teori konspirasi yang dikaitkan dengan bisnis tentunya atas alasan bahwa mereka mengancam sebagian besar pemangku kepentingan bisnis seperti halnya konsumen dan masyarakat luas (Sundari & Syarifudin, 2022),

perusahaan (Sidarta et al., 2021), serta lembaga non-pemerintah dan (antar) pemerintah. Pernyataan Oliver (2022) menjadi salah satu pertimbangan peneliti dalam mengkaji konspirasi terkait bisnis dalam konteks IAF.

Saputra (2018) memberikan pernyataan bahwa konspirasi yang biasa dilakukan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap dijalankan oleh supplier barang dan jasa dengan oknum pegawai pemerintahan itu sendiri dan menimbulkan praktik korupsi, konspirasi, dan nepotisme. Sebagaimana konspirasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dipaparkan oleh Tanyo (2020) mengenai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan Zainudin (Bupati Lampung Selatan) yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus korupsi melalui konspirasi. Tindakan konspirasi Zainudin ini terbukti bahwa yang bersangkutan menerima uang dari Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PAN, Agus Bhakti Nugroho (ABN), yang sumbernya dari proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan sejumlah Rp57 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi bisa terwujud melalui adanya konspirasi yang melibatkan beberapa pihak yang memiliki kewenangan yang besar dalam mengendalikan sebuah kegiatan operasi bisnis. Selain itu, Kajian topik mengenai konspirasi pengadaan sebelumnya telah beberapa kali dilakukan dengan *scope* yang beragam seperti halnya pada konteks *procurement* sebagai upaya mengatasi konspirasi pengadaan Andriana (2021), begitupun mengenai upaya mendeteksi konspirasi pengadaan barang dan jasa melalui penawaran harga Darmawan (2022), hingga perlindungan hukum terkait dengan konspirasi pengadaan barang dan jasa juga telah dikaji (Rondonuwu, 2016).

Dari beberapa kajian mengenai konspirasi pengadaan barang dan jasa, peneliti menemui kelemahan yaitu sebagian besar penelitian konspirasi hanya dilakukan pada lingkungan kerja pemerintahan, sedangkan telah dikaji sebelumnya bahwa konspirasi ini berakibat pada kerugian beberapa pihak (Prabawani & Kholil, 2017). Oleh sebab itu, kebaruan penelitian ada pada potensi konspirasi pada Korporasi *Non-go public* dalam menelaah proses bisnis yang berkaitan dengan pengadaan dan *engineering*. Hal demikian mengarah pada pendapat peneliti bahwa kerugian akibat potensi konspirasi pengadaan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada selain lingkup kerja pemerintahan seperti halnya Korporasi *Non-go public*. Dengan ini, sejauh pengetahuan peneliti belum ditemui kajian mengenai potensi konspirasi pengadaan barang dan jasa pada perusahaan *non-go public* yang dikaitkan dengan IAF sebagai pagar pengendalian sebuah organisasi. Tidak cukup sampai pada potensi konspirasi lingkup pengadaan barang dan jasa, penelitian ini juga menambah kebaruan dengan memadukan potensi konspirasi pada ranah pengadaan barang dan jasa dengan lingkup *engineering*, dimana lingkup *engineering* secara garis besar akan berkaitan dengan *sparepart* dan mesin produksi maupun beberapa peralatan yang digunakan dalam proses produksi.

Riset ini mencoba untuk memberikan kontribusi terhadap literatur dengan mengungkap potensi konspirasi dalam lingkup pengadaan dan *engineering* serta mengaitkan dengan IAF oleh Auditor internal menggunakan pendekatan studi kasus dalam bingkai teori konspirasi. Topik ini diyakini menjadi penting untuk dikaji, dikarenakan potensi konspirasi ini berpotensi dalam memberikan kerugian saat pengendalian tidak segera ditingkatkan. Harapan peneliti agar potensi konspirasi dapat dikenali serta diketahui banyak pihak untuk dipertimbangkan guna mendapatkan solusi. Dengan demikian, rumusan permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana potensi konspirasi di lingkup pengadaan dan *engineering* Korporasi XYZ ditemui pada proses bisnis berpotensi mengganggu penerapan IAF sehingga berakibat pada kerugian Korporasi XYZ.

LANDASAN TEORITIS

Teori Konspirasi

Popper mengemukakan bahwa konspirasi ditimbulkan oleh komplotan rahasia (Pigden, 2019). Penelitian ini memaparkan bagaimana potensi konspirasi yang diciptakan pada lingkup pengadaan dan *engineering* serta keterkaitannya dengan IAF Korporasi XYZ yang merujuk pada Douglas *et al.* (2019) dengan mengasumsikan bahwa konspirasi adalah sebuah kejadian yang besar telah direncanakan secara tersembunyi oleh sebuah organisasi yang kuat dan jahat, serta mengimplementasikan kejahatannya secara bersamaan. Ranah konspirasi pada penelitian ini mengarah pada potensi tindak konspirasi dalam pada Korporasi XYZ lingkup pengadaan dan *engineering*.

Adapun potensi konspirasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah dengan memadukan makna potensi yaitu kemungkinan terjadi dan makna konspirasi yaitu secara garis besar dimaknai sebagai: (1) tindakan menyimpang, (2) sembunyi-sembunyi, dan (3) berkelompok. Dengan demikian potensi konspirasi yang diteliti pada penelitian ini diartikan sebagai kemungkinan yang diciptakan secara berkelompok dan tersembunyi dalam menjalankan misi kejahatan. Dengan ini teori konspirasi akan digunakan dalam mengidentifikasi kelompok sosial tertentu, yang mana didalam penelitian ini akan dikaitkan dengan rangkaian pola yang disusun terkait potensi konspirasi oleh beberapa bagian dan apa dampak yang ditimbulkan terhadap IAF yang dibangun sebagai fungsi pengendalian sebuah Korporasi.

Syarat konspirasi menurut teori konspirasi ialah para konspirator harus melihat diri mereka sendiri menghadapi masalah yang dapat diselesaikan secara terselubung. Pada penelitian ini, beberapa pihak diduga telah bekerja sama dalam meloloskan aksinya seperti halnya bagian pengadaan, bagian gudang, bagian produksi, bagian QC, bagian PPIC, bagian *engineering*, vendor, bengkel eksternal. Disamping itu, Mereka harus percaya bahwa upaya mereka sendiri tanpa bantuan tidak akan cukup, selain itu mereka harus percaya bahwa ada orang lain yang percaya bahwa mereka menghadapi masalah dengan solusi yang sama (Pigden, 2019). Peneliti sepakat bahwa dapat dikatakan bahwa ini merupakan konspirasi apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah dikemukakan tersebut.

Teori *Fraud Triangle*

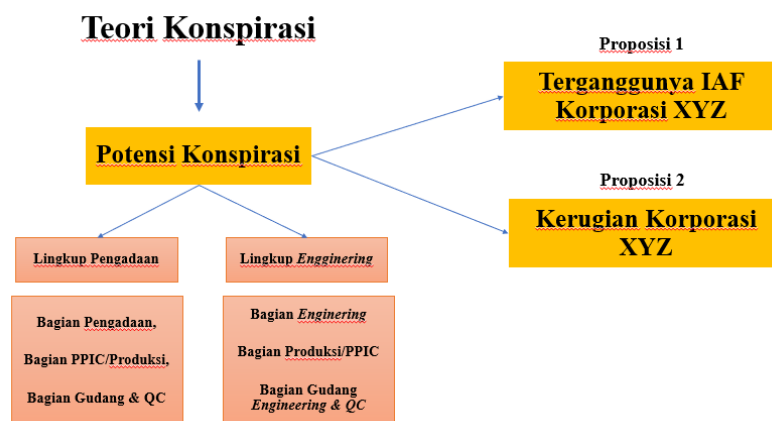
Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE (2016) mengkategorikan fraud sebagai penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, dan Korupsi (Mukoffi et al., 2023). Adapun korupsi memiliki prosentasi tertinggi yaitu 64,4% yang menunjukkan bahwa korupsi merupakan fraud yang lebih sering terjadi. Perusahaan manufaktur memiliki akun persediaan dan akun yang tidak dapat tertagih yang tinggi, oleh sebab itu kemungkinan kecurangan banyak terjadi di sektor manufaktur (Dewi, 2021). Mayoritas skema korupsi salah satunya mengarah pada lingkup pengadaan barang, dimana kerap ditemui bahwa tujuan fraud dalam hal ini ialah untuk menghasilkan pencairan dari vendor (Wells, 2017). Hal demikian menjadi salah satu pertimbangan untuk mengkaji terkait potensi konspirasi dalam lingkup pengadaan dan *engineering* yang mengarah pada kasus korupsi (Waromi et al., 2024). Adapun pertimbangan peneliti dalam mengkategorikan potensi konspirasi pengadaan dan *engineering* sebagai kasus korupsi diperkuat oleh Wells (2017) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab korupsi ialah adanya *conflict of interest* antara pegawai Korporasi XYZ dan Pemilik.

Internal Audit Function (IAF)

Menurut panduan dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) telah disampaikan bahwa banyak pihak semakin mengandalkan IAF dalam meningkatkan serta mengawasi terhadap efektivitas pengendalian intern, *corporate governance*, serta pengelolaan risiko. Dengan ini peneliti berpendapat bahwa perlunya pengetahuan mengenai celah-celah yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak dalam penerapan IAF sebagai upaya manajemen risiko. Hal demikian diyakinkan oleh Zunaedi et al. (2022) bahwa Penerapan manajemen risiko yang efektif merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir risiko yang berakibat pada kerugian Korporasi, maka penelitian ini melakukan riset terkait bagaimana IAF berpotensi terganggu oleh adanya potensi konspirasi yang diciptakan oleh sekelompok bagian dari lingkup pengadaan dan *engineering*.

Proposisi Penelitian

Keterkaitan potensi konspirasi terhadap pengendalian internal meliputi gangguan konspirasi pada prosedur yang telah diterapkan pada proses pengadaan maupun proses *engineering*. Adapun proses pengadaan dan *engineering* dalam hal ini melibatkan beberapa bagian pada Korporasi XYZ. Oleh karena itu, apabila beberapa bagian ini terlibat konspirasi, maka alur pengendalian internal yang menjadi wewenang dari Auditor Internal secara langsung akan terganggu (Sari et al., 2024).



Gambar 1. Proposisi Penelitian

Oleh sebab itu, peneliti mengangkat proposisi penelitian yang tertuang pada Gambar 1 yaitu: (1) Potensi konspirasi dalam lingkup pengadaan dan *engineering* yang tidak segera diatasi akan berpotensi mengganggu misi IAF dalam menegakkan kontrol pada Korporasi XYZ, (2) Potensi tindakan konspirasi berpotensi pada kerugian Korporasi XYZ. Sehingga jika dibuatkan gambar, proposisi penelitian ini dapat dituangkan sebagai berikut

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal (Yin, 2003). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji potensi konspirasi dalam lingkup pengadaan serta *engineering* dan dampaknya pada penerapan IAF dalam Korporasi XYZ. Tempat penelitian ialah Korporasi XYZ yang merupakan jenis perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur pengolahan kayu di Jawa Timur. De Saint-Georges (2018) memaparkan bahwa dalam penelitian jenis ini yang paling penting adalah memiliki kedekatan dan akses untuk menggali informasi dari situs penelitian, sehingga peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang terlibat langsung dalam lingkup pengadaan dan *engineering* sebagai berikut: Direktur, Auditor Internal, Bagian Pengadaan, Bagian *Engineering*, Bagian Produksi/PPIC, Bagian Gudang Bahan Baku, Bagian Gudang Sparepart, Vendor. Dari beberapa informan penelitian, maka data akan dikumpulkan melalui empat cara, diantaranya: *interviews*, *direct observation*, *documentation*, dan *archival record* (Nur'aini, 2020). Dari data yang dikumpulkan maka akan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu *pattern matching*, *explanation building*, *time-series analysis* (Lazuardian & Zaki, 2020). Upaya analisis data pertama dimulai dengan cara *pattern matching* atau pencocokan pola. Tahapan *pattern matching* dimulai dengan mencocokkan beberapa temuan penelitian dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang menghasilkan beberapa pola dimana konspirasi bisa dijalankan. Pola-pola atas potensi konspirasi disusun pada lingkup pengadaan maupun lingkup *engineering*. Atas pola yang sudah ditemukan, maka selanjutnya dilakukan tahap *explanation building* atau membangun penjelasan. Pada tahap *explanation building*, peneliti akan membangun penjelasan bahwa potensi konspirasi memiliki hubungan erat dengan bagaimana IAF yang telah diterapkan pada Korporasi XYZ khususnya pada SOP Pengadaan Barang dan SOP *Engineering*. Langkah terakhir dalam upaya analisis data ialah melakukan *time-series analysis* atau menyusun kronologi kejadian yang mencakup urutan kronologis tentang bagaimana potensi konspirasi pada lingkup pengadaan maupun *engineering* dapat dijalankan serta dampaknya bagi Korporasi XYZ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada SOP atas pengadaan barang maupun SOP *engineering* dan wawancara langsung dengan direktur, auditor internal, bagian pengadaan, produksi/PPIC, gudang bahan baku dan sparepart serta vendor Korporasi XYZ, diketahui bahwa dalam menjalankan proses pengadaan barang melibatkan beberapa bagian seperti halnya bagian pengadaan, *engineering*, gudang, produksi/PPIC, dan QC gudang. Oleh sebab itu akan diuraikan gambaran terkait bagaimana potensi konspirasi yang dijalankan serta potensi terganggunya IAF pada lingkup pengadaan dan *engineering* Korporasi XYZ. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan berbagai temuan yang mampu menjawab berbagai pertanyaan peneliti. Observasi juga dilakukan baik secara bersamaan maupun terpisah dengan jadwal wawancara informan di Korporasi XYZ. Dokumentasi juga diperlukan oleh peneliti dalam membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan observasi langsung dengan informan.

Hasil wawancara dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa potensi konspirasi ditemui dengan menelaah pola-pola konspirasi yang terbentuk sebagai gambaran atas tindakan fraud yang dikemukakan pada Teori *Fraud Triangle* yaitu terdapat beberapa faktor mengapa potensi konspirasi pada Korporasi XYZ ini muncul, diantaranya adalah adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Berikut adalah uraian terkait pola-pola atas potensi konspirasi lingkup pengadaan dan *engineering*, diantaranya: (1) barang dari vendor X bisa masuk ke perusahaan, maka karyawan bagian pengadaan menerima *fee* (*success fee*) dari vendor x, (2) bahan baku dibuat *under grade*, (3) pekerjaan produksi diperbanyak, sehingga menyebabkan karyawan bagian produksi lembur kerja, (4) bahan produksi digunakan dalam rentang waktu pendek dengan maksud agar PT. XYZ segera melakukan pembelian kembali atas bahan baku, (5) harga bahan baku *under grade* dibuat sama dengan harga bahan baku *grade premium*, (6) pembenahan mesin produksi dialihkan ke bengkel eksternal.

Pada umumnya, sebuah Korporasi mempekerjakan auditor internal melalui IAF guna mengendalikan semua proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan melalui aturan dalam SOP pengadaan bahan maupun *engineering*, seperti halnya Abdullah *et al.* (2018) mengutarakan bahwa IAF merupakan elemen penting dalam

membantu mencegah dan mendeteksi penyimpangan yang dihasilkan dari kesalahan maupun penipuan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, peneliti menemui sebuah kejanggalan pada proses di lapangan, dimana Korporasi XYZ ini telah memiliki bagian internal audit, namun dugaan adanya potensi konspirasi muncul ketika beberapa pihak membuat kesepakatan guna bekerja sama dalam memperoleh keuntungan secara pribadi walaupun hal demikian berpotensi membawa dampak kerugian bagi Korporasi. Dari kerjasama oleh beberapa pihak di lingkup pengadaan maupun *engineering*, dapat ditarik makna bahwa hal demikian sejalan dengan gambaran besar fraud oleh Teori *Fraud Triangle*. Faktor fraud yang pertama yaitu adanya tekanan. Adapun tekanan ini dapat muncul berupa tuntutan kepada semua pihak yang turut serta dalam konspirasi. Tekanan juga mendorong para konspirator di lingkup pengadaan dan *engineering* untuk menjalankan misinya sesuai kesepakatan yang disepakati bersama. Faktor fraud kedua menurut Teori *Fraud Triangle* yaitu kesempatan. Dari apa yang ditemui di lapangan saat peneliti menjalankan observasi, tampak bahwa terdapat interaksi langsung pada operasional pengadaan yaitu antara bagian QC (*Grader*) Korporasi XYZ dan pihak vendor dalam upaya pengecekan ulang atas bahan yang akan dikirimkan ke Gudang Korporasi XYZ. Dalam hal ini, terdapat kesempatan untuk menjalin hubungan istimewa dalam mewujudkan konspirasi pengadaan bahan baku maupun alat *sparepart*. Selanjutnya ialah faktor fraud yang ketiga menurut Teori *Fraud Triangle* ialah rasionalisasi. Pada penelitian ini faktor rasionalisasi bisa tampak dengan adanya *conflict of interest* antara pegawai Korporasi XYZ dan pemilik.

Dari apa yang dipahami melalui Teori *Fraud Triangle*, peneliti akan memaparkan terkait beberapa fenomena yang berkaitan dengan bagaimana konspirasi ini mungkin terjadi melalui enam pola. Pertama adalah *success fee*. Adapun *success fee* yang dimaksud ialah sejumlah uang diterima oleh bagian pengadaan dari vendor atas keberhasilan bagian pengadaan dalam memasukkan barang vendor A ke Korporasi XYZ. Hal demikian tercermin pada hasil observasi dan dokumentasi yaitu saat bahan baku yang bukan *grade A* ditemui di Gudang Korporasi XYZ. Apabila hal ini dijalankan terus-menerus, maka Korporasi XYZ akan dirugikan atas tahap penawaran yang tidak adil, kejadian ini sejalan dengan Prabawani & Kholil (2017) bahwa konspirasi ini berakibat pada kerugian beberapa pihak. pola kedua konspirasi” yaitu bahan baku *under grade*. Pola tersebut diduga memiliki dampak signifikan pada “pola potensi konspirasi ketiga” yaitu memperbanyak volume pekerjaan bagian produksi dengan sengaja, sehingga menyebabkan karyawan bagian produksi lembur kerja.

Adapun potensi konspirasi yang dilangsungkan adalah dengan membuat kesepakatan kepada vendor yang telah disetujui oleh Pimpinan untuk mengirimkan bahan baku maupun bahan pembantu dengan mutu yang lebih rendah dibandingkan dengan mutu normal yang telah ditentukan guna proses produksi. Kejadian ini sejalan dengan Douglas *et al.* (2019) bahwa sebuah kejadian yang besar telah direncanakan secara tersembunyi oleh para pelaku konspirasi guna meloloskan aksinya dan meraih pundi-pundi rupiah dengan cara yang jahat. Hal demikian dilakukan agar ketika bahan baku *under grade* masuk pada proses produksi, maka akan menjadikan proses produksi ini membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan dengan bahan baku normal. Upaya ini disengaja guna membuat karyawan bagian produksi ini lembur guna menyelesaikan target pekerjaan. Apabila lembur berhasil direalisasikan maka karyawan bagian produksi akan mendapat upah tambahan akibat lembur yang sebenarnya sudah di *setting* oleh bagian pengadaan. Selanjutnya adalah pola keempat, yaitu membuat agar bahan baku maupun bahan pembantu memiliki rentang penggunaan yang pendek. Misi tersebut dilakukan dengan dugaan agar bahan baku maupun bahan pembantu ini lekas habis dan bagian pengadaan nantinya akan membuat PO (*Purchase Order*) kembali ke vendor.

Asumsi yang digunakan oleh pihak-pihak konspirator ini adalah ketika semakin banyak dan semakin sering perusahaan berhasil memasukkan barang milik vendor ke perusahaan maka bonus atau *success fee* yang diberikan vendor kepada karyawan ini akan semakin meningkat. Iming-iming inilah yang dipahami peneliti sebagai alasan mengapa beberapa pihak ini setuju untuk berkonspirasi dalam mewujudkan misinya yaitu dengan mendapatkan keuntungan pribadi di luar apa yang diperolehnya dari perusahaan melalui gaji. Fenomena diatas sejalan dengan pernyataan Keeley (1999), yang menyatakan bahwa konspirasi terbentuk sebagai plot rahasia dengan melibatkan dua atau lebih pihak yang memiliki kekuatan. Kekuatan ini terwujud saat konspirasi disepakati untuk dijalankan. Atas potensi konspirasi berikutnya dapat diketahui melalui pemikiran atas pola kelima konspirasi dimana telah ditemui adanya bahan baku di Gudang yang bukan merupakan *grade premium*. Hal demikian tentu menjadi temuan atas indikasi konspirasi, karena dinilai masuk pada tindakan menyimpang dan melanggar SOP, dimana pemesanan atas bahan baku telah diatur dalam SOP Pengadaan yaitu bahan baku *grade premium*.

Pola selanjutnya adalah terkait dengan lingkup *engineering*, yaitu pola pembenahan mesin produksi dialihkan ke bengkel eksternal. Adapun motif ini dilakukan oleh sekelompok pihak guna mendapatkan keuntungan pribadi. Misi ini mungkin dilakukan atas iming-iming bonus dari bengkel eksternal apabila karyawan bisa membuat seolah perbaikan mesin produksi tidak bisa dilakukan di bengkel internal yang

disebabkan oleh beberapa keadaan yang sengaja dilakukan oleh beberapa karyawan. Terkait keadaan-keadaan ini dibuat agar tampak rasional ketika ada pertanyaan dari Pimpinan. Beberapa keadaan yang kerap dijadikan alasan diantaranya adalah tidak adanya kriteria khusus terkait perbaikan mesin di bengkel eksternal. Dari keadaan tersebut, maka beberapa pihak dalam hal ini merupakan pegawai yang berwenang dalam operasional *engineering* diduga membuat rasionalisasi guna mendapat keuntungan pribadi, seperti halnya membuat beberapa alasan dalam melakukan perbaikan di bengkel eksternal. Beberapa alasan yang dirasionalisasi diantaranya: keterbatasan tenaga guna memperbaiki mesin produksi, pekerjaan *overload*, alat untuk memperbaiki tidak memadai, mesin peralatan produksi butuh segera bisa digunakan, karena tanggal pengiriman sudah dekat.

Upaya rasionalisasi yang dilakukan sejalan dalam apa yang dikemukakan dalam Teori *Fraud Triangle*, faktor ketiga yaitu rasionalisasi adalah salah satu bentuk upaya dalam meloloskan aksi tindakan fraud. Beberapa upaya dilakukan oleh karyawan guna mendapatkanya *tips* tambahan dari bengkel eksternal. Dari beberapa cuplikan fenomena sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan terkait dengan kronologi atas potensi konspirasi yang menjadikan hal demikian memiliki kemungkinan untuk dilakukan bersama, diantaranya:

1. Potensi Konspirasi Pengadaan Bahan

Adapun kronologi atas konspirasi pengadaan bahan baku mencakup beberapa keadaan, diantaranya: Potensi Tawaran dari vendor X, Potensi Bagian Pengadaan menyetujui tawaran dari Vendor, Potensi Bagian Pengadaan memberikan info ke Bagian Gudang agar membuat permintaan pesanan seakan menjadi banyak, dengan alasan akan mendapat bonus dari vendor apabila pesanan mencapai jumlah yang disepakati oleh Bagian Pengadaan dan vendor, Bagian Pengadaan meneruskan formulir permintaan pesanan barang yang diperoleh dari bagian gudang kepada pimpinan guna mendapat persetujuan terkait kuantitas barang, type barang, maupun vendor, Potensi Bagian Pengadaan meyakinkan Atasan bahwa vendor X ini lebih unggul dan terpercaya dibandingkan dengan vendor yang lain, Atasan menyetujui pesanan bahan baku dari vendor X, Bagian Pengadaan membuat *purchase order* (PO) dengan spek *grade A* ke Vendor X, Potensi Vendor X mengirimkan barang pesanan dengan barang campuran antara *grade A* dan *grade B* ke Gudang Korporasi XYZ, Potensi QC yang bertindak sebagai *grader* akan meloloskan barang *under grade* untuk dikirimkan, Potensi Bagian Pengadaan memberikan info ke Bagian *Quality Control* (QC) Gudang bahwa akan datang barang (*stock*) dari vendor X dengan tujuan barang yang tidak sesuai spek atau dalam hal ini yang dimaksud adalah *grade B* untuk tidak di retur, Potensi Bagian QC Gudang mengiyakan serta mencatat bahwa barang pesanan dikirim sesuai pesanan, Potensi Vendor berikan *tips* (*success fee*) ke Bagian Pengadaan atas tindakan konspirasi tersebut, Potensi bagi hasil, dimana Bagian Pengadaan membagi *tips* dari Vendor ke beberapa pihak yang ikut serta untuk melancarkan aksi tersebut, Potensi Bagian Pengadaan memberikan info ke Bagian *PPIC* (*Production, Planning and Inventory Control*) agar bahan baku dengan spek *grade B* bisa masuk ke produksi yaitu diatur dengan diberikan proses pengolahan tambahan, Akibat pengolahan yang memerlukan tambahan proses, maka Bagian *PPIC* berpotensi meminta agar para karyawan produksi untuk lembur guna pesanan *customer* bisa selesai tepat waktu.

2. Potensi Konspirasi *Engineering* Tentang Pemesanan Sparepart

Merujuk pada SOP *engineering* Korporasi XYZ, pemesanan sparepart melibatkan beberapa bagian, diantaranya bagian gudang sparepart, bagian pengadaan, bagian QC gudang dan bagian *engineering*. Potensi konspirasi dinilai ada karena beberapa bagian akan bekerja sama dalam menjalankan proses bisnis, seperti halnya bagian gudang *engineering* berwenang untuk melakukan permintaan atas sparepart yang dibutuhkan dan menerima pesanan sparepart dari vendor yang datang ke gudang, bagian QC berwenang melakukan pemeriksaan atas kualitas sparepart, bagian *engineering* dalam hal ini berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas alat atau mesin produksi yang mengalami kerusakan maupun fungsinya tidak normal. Lain itu bagian pengadaan berwenang dalam melakukan pemesanan sparepart ke vendor.

Adapun kronologi terhadap potensi konspirasi di lingkup *engineering* Korporasi XYZ adalah: Potensi adanya tawaran vendor ke bagian pengadaan, Potensi adanya tawaran dari bagian pengadaan ke bagian *engineering* terkait dengan *tips* dari vendor jika pesanan sparepart ke Vendor Y ini masuk pada jumlah yang disepakati, Potensi bagian *engineering* setuju terhadap tawaran *tips* tersebut dan menginfo bagian QC gudang *engineering*, Potensi bagian *engineering* dalam menyiapkan beberapa alasan yang dirasionalisasi guna membuat seakan memang benar bahwa pesanan sparepart ini sangat banyak hingga masuk pada rentang jumlah kesepakatan antara Bagian Pengadaan dan Vendor, Potensi bagian *engineering* membuat formulir permintaan sparepart sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya dengan Bagian Pengadaan, Bagian Pengadaan mengajukan formulir tersebut kepada Atasan sekaligus menyertakan beberapa Vendor yang nantinya akan dipilih hanya satu Vendor saja, Potensi bagian

Pengadaan dalam hal ini berusaha meyakinkan Atasan untuk tujuan tertentu dengan memberikan ulasan bahwa Vendor Y ini lebih unggul dibandingkan dengan vendor yang lain, Atasan memberikan persetujuan, Bagian Pengadaan membuat *purchase order (PO)* dengan sparepart yang sesuai dengan spek yang biasa digunakan oleh Korporasi XYZ ke Vendor Y, Potensi Vendor Y mengirimkan pesanan tidak sesuai dengan spek yang biasa digunakan oleh Korporasi XYZ, yang mana ini merupakan kesepakatan yang telah dibuat bersama Bagian Pengadaan sebelumnya, Potensi bagian QC yang bertindak sebagai *grader* akan meloloskan barang yang *under grade* untuk dikirimkan ke Gudang Korporasi XYZ, Potensi bagian Pengadaan memberikan informasi kepada bagian gudang *engineering* bahwa nantinya akan ada barang datang ke gudang *engineering* dari Vendor Y dengan tujuan agar tidak mengajukan retur apabila barang pesanan yang datang berbeda dari biasanya, Potensi bagian QC memberikan catatan bahwa barang pesanan dikirim sesuai dengan *PO*, Potensi bagian pengadaan diberikan tips (*success fee*) dari Vendor Y ke beberapa bagian yang terlibat melancarkan misinya.

3. Potensi Konspirasi *Engineering* Tentang Perbaikan Mesin

Pada lingkup *engineering*, konteks perbaikan mesin telah dicantumkan prosedur pengajuan perbaikan mesin dalam SOP. Adapun proses perbaikan mesin produksi ini melibatkan beberapa bagian, diantaranya adalah bagian *engineering* bengkel internal, QC, produksi/PPIC, gudang *engineering*. Dengan demikian potensi konspirasi ini dinilai melibatkan bagian-bagian yang tercantum dalam prosedur *engineering* pada SOP *engineering* Korporasi XYZ. Hal demikian disebabkan adanya rantai kerja dalam proses bisnis *engineering*, seperti halnya bagian operator produksi saat menemui kendala akan mengajukan laporan ke bagian *engineering*, bagian QC berwenang memeriksa bahwa mesin benar-benar tidak berfungsi dengan baik, bagian gudang *engineering* berwenang dalam memberikan informasi terkait keberadaan stok sparepart ke bagian *engineering*, dan selanjutnya bagian *engineering* bertanggung jawab terhadap perbaikan mesin maupun peralatan produksi. Berikut adalah kronologi atas potensi konspirasi di Korporasi XYZ: Bagian operator produksi melapor atas kerusakan mesin produksi kepada bagian *engineering*, Potensi tawaran *fee* dari bengkel eksternal atas bagi hasil kepada bagian *engineering*, apabila bisa membawa mesin rusak ke bengkel eksternal miliknya, Potensi bagian *engineering* menyetujui tawaran tersebut, Potensi bahwa bagian *engineering* tergiur atas uang yang dijanjikan bengkel eksternal, sehingga bagian *engineering* tidak memeriksa terlebih dahulu terhadap kerusakan mesin dan beralih bahwa mesin perlu dibawa ke bengkel eksternal dengan merasionalisasi alasan, seperti halnya bengkel internal sedang penuh, kurangnya tenaga untuk memperbaiki kerusakan mesin, serta membutuhkan waktu lama dikarenakan sedang banyak mesin yang harus dibenahi di bengkel internal.

Dari beberapa uraian diatas, yaitu pola-pola atas potensi konspirasi serta kerugian yang mungkin dihadapi oleh Korporasi XYZ dapat dipahami bahwa semuanya sejalan dengan Teori *Fraud Triangle* yang mengemukakan tiga faktor fraud yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang diwujudkan dalam upaya konspirasi di lingkup pengadaan dan *engineering* Korporasi XYZ. Maka dari itu, peneliti juga berusaha menyandingkan proposisi kedua yaitu "Potensi tindakan konspirasi berpotensi pada kerugian Korporasi XYZ". Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta dikuatkan kembali dengan temuan di gudang (dokumentasi) bahwa terdapat beberapa barang yang bukan merupakan *grade* premium. Dengan demikian, berikut adalah potensi kerugian yang dimiliki oleh Korporasi XYZ apabila konspirasi terjadi, diantaranya:

1. Potensi Kerugian Konspirasi pada Lingkup Pengadaan

Barang yang diterima Korporasi XYZ realitanya tidak sesuai dengan pesanan yang tertera pada *PO*, Barang pesanan yang diterima adalah *under grade*, dimana spek umum adalah *grade A*, namun yang dikirim ialah *grade B*, Barang spek *grade B* memiliki masa guna yang kurang kuat dibandingkan dengan *grade A*, sehingga akan mempercepat pembelian barang baku selanjutnya, Harga barang yang dibayar adalah sesuai *PO* yaitu seharga dengan barang *grade A*, namun realitanya yang sampai ke Gudang adalah *grade B*, Barang dengan spek *grade B* memerlukan proses produksi lebih banyak dibandingkan dengan barang dengan spek *grade A*, Apabila terdapat penambahan proses produksi akibat adanya barang dengan spek *grade B*, maka akan meningkatkan biaya overhead seperti halnya biaya listrik, biaya lembur dan biaya pemeliharaan mesin dan alat-alat untuk produksi.

2. Potensi Kerugian Konspirasi pada Lingkup *Engineering*

Sparepart mesin yang seharusnya masih dapat digunakan diputuskan untuk diganti, dengan maksud agar *stock sparepart* segera habis dan akan dilakukan *PO* kembali, Perbaikan mesin produksi yang



seharusnya bisa dilakukan di bengkel internal, realitanya dibawa ke bengkel eksternal. Hal tersebut dikarenakan bengkel eksternal memberikan *tips* jika mesin yang rusak diserahkan ke bengkel eksternal untuk dibenahi, Korporasi XYZ dalam hal ini akan menanggung biaya pembelian sparepart yang seharusnya belum waktunya untuk diganti, sekaligus biaya perbaikan mesin di bengkel eksternal.

KESIMPULAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu adanya potensi konspirasi pada *scope* pengadaan dan *engineering* yang tidak segera diberikan tindak lanjut akan berpotensi mengganggu IAF pada Korporasi XYZ. Pola atas potensi konspirasi yang dihasilkan sejalan dengan faktor-faktor fraud yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dari ketiga faktor ini, terbentuklah pola konspirasi diantaranya: 1) potensi *success fee* yang diberikan vendor, 2) potensi pengiriman bahan baku *under grade*, 3) potensi penambahan proses produksi, 4) potensi bahan produksi digunakan dalam rentang waktu yang pendek, 5) potensi penyetaraan harga bahan baku *under grade* dengan bahan baku *top grade*, dan 6) potensi pembenahan mesin produksi dialihkan ke bengkel eksternal. Berbagai konspirasi yang terjadi di Korporasi XYZ mengarah pada ketidaktaatan dalam menerapkan prosedur pengendalian dalam IAF yang diwujudkan dalam bentuk SOP pengadaan bahan baku, pengadaan *sparepart*, maupun perbaikan mesin produksi. Konspirasi tersebut dapat terwujud ketika para konspirator bersepakat untuk menjalankan segala cara dalam mewujudkan keinginannya dengan memanfaatkan kesempatan yang ada serta merasionalisasi beberapa tindakan menyimpang. Dengan demikian, potensi konspirasi yang mengarah pada tindakan fraud ini berpotensi terhadap kerugian yang dialami Korporasi XYZ. Potensi kerugian pada lingkup pengadaan dan *engineering* pada korporasi ini ini mengarah ke beberapa aspek diantaranya: kerugian material dengan meningkatnya biaya gaji lembur karyawan, biaya operasional produk, biaya perbaikan mesin, biaya pengadaan sparepart serta biaya-biaya lainnya yang terwujud akibat penambahan proses produksi, pemesanan sparepart *undergrade*, pemesanan bahan baku *undergrade*, dan perbaikan mesin yang dilakukan di bengkel eksternal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi konspirasi mengarah pada dampak negatif terhadap IAF hingga kerugian bagi Korporasi XYZ. Sehingga, dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan alat untuk membangkitkan kewaspadaan dengan meningkatkan pengendalian pada daerah yang ditemui rawan terhadap tindak kejahatan dan kecurangan, salah satunya yaitu *scope* pengadaan dan *engineering*. Maka dari itu terdapat dua usulan peneliti sebagai bentuk kewaspadaan akan tindakan konspirasi yaitu dengan menerapkan sistem *e-procurement* dan sistem *whistle blowing*.

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Airlangga yang telah memberikan dukungan dan kesempatan terlaksananya kegiatan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen Departemen Akuntansi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Airlangga, dan partner penulis dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dukungan dalam menulis artikel ini, serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-per satu yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Abdelrahim, A., & Al-Malkawi, H.-A. N. (2022). The influential factors of internal audit effectiveness: a conceptual model. *International Journal of Financial Studies*, 10(3), 71.
- Abdullah, R., Ismail, Z., & Smith, M. (2018). Audit committees' involvement and the effects of quality in the internal audit function on corporate governance. *International Journal of Auditing*, 22(3), 385–403.
- Alemany Oliver, M. (2022). Navigating Between the Plots: A Narratological and Ethical Analysis of Business-Related Conspiracy Theories (BrCTs). *Journal of Business Ethics*, 175(2), 265–288. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04612-3>
- Anderson, U. L., Christ, M. H., & Janvrin, D. J. (2015). Comments by the Auditing Standards Committee of the Auditing Section of the American Accounting Association on The Institute of Internal Auditors' Proposed Enhancements to the International Professional Practices Framework (IPPF) Participating Committee M. *Current Issues in Auditing*, 9(1), C23–C33.
- Andriana, G. (2021). Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 351–380. BADARA, M. S., & SAIDIN, S. Z.



- (2013). The Journey so far on Internal Audit Effectiveness: a Calling for Expansion. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 3(3), 340–351. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v3-i3/225>
- Badara, Saidu, M., & Saidin, S. Z. (2013). The Journey so far on Internal Audit Effectiveness: a Calling for Expansion. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 3(3), 340–351. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v3-i3/225>
- Bonrath, A., & Eulerich, M. (2021). Internal auditing's role in preventing and detecting fraud: An empirical analysis. *International Journal of Auditing*.
- Cohen, A., & Sayag, G. (2010). The Effectiveness of Internal Auditing: An Empirical Examination of its Determinants in Israeli Organisations. *Australian Accounting Review*, 20(3), 296–307. <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2010.00092.x>
- Conrad, C. A. (2018). Business Ethics - A Philosophical and Behavioral Approach. In *Business Ethics - A Philosophical and Behavioral Approach*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-91575-3>
- Darmawan, S. A. (2022). Mendeteksi Persekongkolan dari Pola Penawaran Harga. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.6>
- de Saint-Georges, I. (2018). Generalizing from Case Studies: A Commentary. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 52(1), 94–103. <https://doi.org/10.1007/s12124-017-9402-x>
- DeSimone, S., D'Onza, G., & Sarens, G. (2021). Correlates of internal audit function involvement in sustainability audits. In *Journal of Management and Governance* (Vol. 25, Issue 2). <https://doi.org/10.1007/s10997-020-09511-3>
- Dewi, I. S. (2021). Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Perspektif Fraud Triangle. *Liabilitas : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(2), 16–27.
- Dewi, I. S. (2021). Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Perspektif Fraud Triangle. *Liabilitas : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(2), 16–27.
- Douglas, K. M., Uscinski, J. E., Sutton, R. M., Cichocka, A., Nefes, T., Ang, C. S., & Deravi, F. (2019). Understanding Conspiracy Theories. *Political Psychology*, 40(S1), 3–35. <https://doi.org/10.1111/pops.12568>
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 24–36.
- Kassem, R., & Turksen, U. (2021). Role of public auditors in fraud detection: A critical review. *Contemporary Issues in Public Sector Accounting and Auditing*, 105, 33–56.
- Keeley, B. L. (2019). Of conspiracy theories. *Conspiracy Theories: The Philosophical Debate*, 45–60. <https://doi.org/10.4324/9781315259574-4>
- Lazuardian, R., & Zaki, I. (2020). Kontribusi Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Pacet Mojokerto. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 472. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp472-485>
- Mardjono, E. S., Suhartono, E., & Hariyadi, G. T. (2024). Does Forensic Accounting Matter? Diagnosing Fraud Using the Internal Control System and Big Data on Audit Institutions in Indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 21, 638–655.
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., & Reda, R. I. (2023). Pengaruh Audit Laporan Keuangan, Penerapan Good Governance, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 6(2), 12–20.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku.



INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur, 16(1), 92–104.
<https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>

- Pigden, C. (2019). Popper revisited, or what is wrong with conspiracy theories? In *Conspiracy theories* (pp. 17–43). Routledge.
- Prabawani, R. D., & Kholil, M. (2017). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, 5(2), 77. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19396>
- Ratri, M. C., & Bernawati., Y. (2020). Penerapan Standar Profesional Audit Internal Dan Kualitas Audit: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(1), 47–56. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i1.605>
- Rondonuwu, A. J. (2016). *Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Liju Zet Viany, SH, MH, Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH. IV(4)*, 109–116.
- Saputra, R. (2018). Praktek Koruptif Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Humaniora Cakrawala Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 221–228.
- Sari, P. A., Sumiadji, S., Nurindrasari, D., & Kusdewanti, A. I. (2024). Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Audit Untuk Meningkatkan Motivasi Pembelajaran Mahasiswa. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 7(1), 38–47.
- Sidarta, A. L., Lating, A. I. S., & Syarifudin, S. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terbuka Terhadap Return Saham pada Masa Pandemi Covid-19 (Pada Perusahaan yang Tercatat di BEI Tahun 2020). *Media Mahardhika*, 20(1), 25–36.
- Sundari, S., & Syarifudin, S. (2022). BUMDes Syariah sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan. *IQTISHODUNA*, 18(1), 17–34.
- Tantyo, M. G. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Lampung. *Corruptio*, 1(2), 117–128. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2098>
- Waromi, J., Kambuaya, M. K. P., & Wonar, K. (2024). Evaluation of the Effectiveness of Internal Control Systems in Reducing Accounting Fraud in Financial Sector Companies. *The Eastasouth Management and Business*, 2(03), 228–232.
- Wells, D. J. T. (2017). *Corporate Fraud Handbook*.
- Yin, R. K. (2003). *case study research design edisi 3.pdf*. Sage publications.
- Zunaedi, B. N. F., Annisa, H. R., & Dewi, M. (2022). Fungsi Internal Audit Dan Manajemen Risiko Perusahaan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 24(1), 59–70. <https://doi.org/10.34208/jba.v24i1.1159>